



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Painan, Mei 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program yakni Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan perundang-undangan, Penataan dan penguatan organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Quick Wins.

Penyusunan Laporan ini berdasarkan hasil penilaian baik internal maupun eksternal. Laporan ini memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dan saran tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan acuan dan feed back guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi eksternal serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap berikutnya.

Disadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya penyusunan Laporan ini, diucapkan terima kasih.

Painan, 4 Mei 2020
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,


AHDA YANUAR, S.Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
2.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	5
2.2 Rencana Perbaikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	21
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 Kesimpulan	28
3.2 Saran	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien pada birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan hakekat Reformasi Birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program yakni Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan perundang-undangan, Penataan dan penguatan organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Quick Wins. Dengan 9 (Sembilan) program RB ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang direncanakan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahun 2019, pertama kali Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dievaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasinya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menghasilkan beberapa capaian pada setiap

area perubahan.

Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan evaluasi, selain evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga dilakukan evaluasi melalui penilaian secara mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Asesor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilakukan melalui berkoordinasi dengan pejabat/pegawai terkait guna dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengisi Lember Kerja Evaluasi. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Monitoring dan Evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.3 Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan dan feed back guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi eksternal.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan perundang-undangan, Penataan dan penguatan organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dan arahan para pengambil keputusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga terendah, dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan terpadu.

Selain itu, program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 adalah pertama kali dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka masih ada beberapa pertimbangan pada berbagai kondisi dari pencapaian 8 (delapan) area perubahan.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021,

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dilakukan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Road Map pada 8 (delapan) area perubahan, sebagaimana diuraikan pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksananaan Reformasi Birokrasi berikut ini :

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TAHUN : 2019

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan
A. PROSES (60)								
1. IEMEN PERUBAHAN (5)		5,00				1,71	34,22%	
1 Tim Reformasi Birokrasi (1)		0,50				0,33	66,67%	
	a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A/B/C	A	1		Keputusan Bupati Pesiris Selatan Nomor 061/441/Kots/BPT-PS/2019 ttng tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesiris Selatan
	b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	B	0,67		Rapat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Masing-masing Perangkat Daerah (Terlampir pada LKE Unit)
	c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	C	0,33		LKJIP Pesiris Selatan
2 Road Map Reformasi Birokrasi (1)		0,50				0,43	86,80%	
	a. Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah		Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak	Ya	1		Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun
	b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan		a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A/B/C	A	1		Road Map telah mencakup 5 area perubahan, dapat dilihat pada Perbup No 27 Tahun 2017
	c. Road Map telah mencakup "quick win"		a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat	A/B/C	A	1		Road Map telah mencakup Quick Win dapat dilihat pada Perbup No 27 Thn 2017 halaman 33-34
	d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi		a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A/B/C/D	B	0,67		Road Map telah melibatkan sebagian besar unit organisasi dapat dilihat pada Perbup No 27 Thn 2017 halaman 42
	e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A/B/C/D	B	0,67		Dokumentasi Sosialisasi Pelaksanaan Road Map
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)		1,00				0,60	59,71%	

3		Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	1,00			0,60	59,71%	
		a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik		a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A/B/C/D	B	0,67	Dokumentasi Rapat PMPRB
		b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja		a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A/B/C/D	B	0,67	Instruksi Bupati Perihal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB		a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A/B/C/D	B	0,67	Dokumentasi Pelatihan Asesor PMPRB
		d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A/B/C/D	B	0,67	Keputusan Bupati Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB secara online pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
		e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?		a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A/B/C	B	0,5	Koordinator asesor telah melakukan Reviu
		f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?		a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor	A/B/C	B	0,5	Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas
		g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	B	0,5	Rencana Aksi terdapat pada Road Map Halaman 42
4		Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	0,50			0,35	69,33%	
		a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	C	0,33	Dokumentasi Rapat RB
		b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan		a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkat tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A/B/C/D/E	B	0,75	WA Grup Bersatu Membangun Pessei

		c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A/B/C/D	A	1			Agent of Change dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 050/235/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Laboratorium Inovasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)			5,00					2,50	50,00%	
	1	Harmonisasi (2,5)	1,25					0,63	50,00%	
		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A/B/C	B	0,5			Dilakukan melalui Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 180/145/ED/HKM/I/2019 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah. Adapun hasil identifikasi, analisis dan pemetaan yaitu Perda Nomor 7 tahun 2005 tentang Izin tempat usaha dan izin gangguan (tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah), Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (tidak sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah), dan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Nagari (tidak sesuai dengan Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang pedoman teknis pemilihan kepala desa
		b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron		a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	A/B/C	B	0,5			Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan upaya dengan ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020, sedangkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang izin tempat usaha dan izin gangguan dan perda nomor 1 tahun 2016 tentang Nagari telah dilakukan pembahasan ditingkat tim
	2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan	2,50					1,88	75,00%	
		a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi		a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D	A	1			Seluruh persyaratan dituangkan kedalam Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/145/ED/HKM/I/2019 tentang Produk Hukum Daerah dan diimplementasikan

		b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C	B	0,5		Terhadap usulan Rancangan Produk Hukum daerah dari perangkat yang tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana mestinya tidak dilakukan pembahasan dan dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilenskani
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)			6,00					0,99	16,50%
	1. Evaluasi (3)		1,50					0,00	0,00%
		a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A/B/C	C	0		
		b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A/B/C	C	0		
		c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A/B/C	C	0		
		d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A/B/C	C	0		
		e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A/B/C	C	0		
		f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A/B/C	C	0		
		g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat		a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A/B/C	C	0		
		h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain		Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya/Tidak	Tidak	0		
		i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya/Tidak	Tidak	0		

	2. Penataan (3)	3,00				0,99	33,00%	
	a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A/B/C/D	C	0,33		
IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)		5,00				2,24	44,81%	
	1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,625				0,364	58,25%	
	a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C/D	C	0,33		Keputusan Bupati Nomor 061/411/Kpts/BPT-PS/2019 ttng Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis
	b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0,67		Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A/B/C/D	A	1		Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) , dimana SOP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
	d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	C	0,33		Dalam bentuk pembaharuan/updating booklet dan SOP serta penambahan SOP
	e. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		a. Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis b. Sebagian besar tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis c. Sebagian kecil tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis d. Belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C/D	B	0,67		Keputusan Bupati Nomor 061/411/Kpts/BPT-PS/2019 ttng Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis
	2 E-Government (2)	0,75				0,75	100,00%	
	a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi		Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya/Tidak	Ya	1		Rencana pengembangan e-government berupa : 1. Master plan e-government 2. Perbup No 24 Thn 2019 ttng Rencana Induk e-government
	b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)		a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A/B/C/D	A	1		Pengembangan e-government mendukung Birokrasi berupa : 1. Keputusan Bupati ttng Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis 2. Keputusan Kepala Diskominfo ttng Pedoman Pengaturan Infrastruktur TIK 3. Aplikasi SIMPEG 4. Aplikasi e-SAKIP 5. Aplikasi SICANTIK 6. Aplikasi LADOKUTU 7. Aplikasi Rujukan Online 8. SIPKD

	3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	0,625				0,625	100,00%	
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1		Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : 1. Perbup Nomor 53 Tahun 2018 ttng Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 2. Keputusan Bupati Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 ttng Penetapan PPIID, PPIID Pembantu 3. Diperolehnya Sertifikat PPIID.
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala berupa : 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Pemantauan Jumlah DIP Perbulan
	4	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00				0,50	50,12%	
		a. Hasil Pengawasan Kearsipan		Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)	Indeks (0-100)	50,12	0,5012		Hasil Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Arsip Eksternal Tahun 2019
	V.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15,00				10,96	73,03%	
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan	0,50				0,50	100,00%	
		a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan		ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya/Tidak	Ya	1		Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/278/BKPSDM-2019 Tentang Mutasi Jabatan Pejabat Adminstrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan		ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya/Tidak	Ya	1		E- Formasi Tahun 2019
		c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan		a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A/B/C/D	A	1		Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/508/BKPSDM-2019 Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan ASN tahun 2019
		d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1		Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi

					2,000	2,00	100,00%	
2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,	2,00						
	a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat		a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A/B/C	A	1		Pengumuman Seleksi CPNS
	b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (<i>online</i>)		Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya/Tidak	Ya	1		https://sscndaftar.bkn.go.id/login
	c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif		Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya/Tidak	Ya	1		Pengumuman Seleksi CPNS
	d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN		Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya/Tidak	Ya	1		1. Proses Ujian menggunakan Sistem CAT. 2. Piagam Penggunaan Sistem CAT pada proses seleksi CPNS
	e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka		Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya/Tidak	Ya	1		Screenshot Pengumuman Hasil Seleksi CPNS
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	0,50			0,500	0,35	70,20%	
	a. Telah ada standar kompetensi jabatan		Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya/Tidak	Ya	1		Laporan Hasil Pemetaan Potensi Pejabat/PNS
	b. Telah dilakukan assessment pegawai		a. Telah dilakukan assessment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan assessment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai	A/B/C/D	B	0,67		Laporan Hasil Pemetaan Potensi Pejabat/PNS
	c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi		a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0,67		RKA Diklat dan Bimtek
	d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	B	0,67		Laporan Hasil Pemetaan Potensi Pejabat/PNS
	e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala		a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C	B	0,5		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai melalui Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja PNS
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	6,00			6,000	5,60	93,40%	
	a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan		Ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya/Tidak	Ya	1		Laporan Hasil Seleksi Pimpinan Tinggi Pertama
	b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan		a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A/B/C/D	B	0,67		Laporan Hasil Seleksi Pimpinan Tinggi Pertama
	c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif		Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya/Tidak	Ya	1		Laporan Hasil Seleksi Pimpinan Tinggi Pertama
	d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen		Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya/Tidak	Ya	1		Laporan Hasil Seleksi Pimpinan Tinggi Pertama

	e.	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka		Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya/Tidak	Ya	1		Pengumuman Seleksi JPT pada web
5	Penetapan kinerja individu (2)		1,00				1,00	100,00%	
	a.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	A/B/C/D	A	1		Usulan Penerima Satya Lencana Karya Satya dan Daftar Penerima Satya Lencana Karya Satya
	b.	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja		a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	A/B/C/D	A	1		Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang TPP
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		0,50				0,50	100,00%	
	a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya/Tidak	Ya	1		Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 ttg Kode Etik Pegawai ASN
	b.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A/B/C	A	1		Dokumentasi Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai
	c.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)		a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi	A/B/C/D	A	1		Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi : 1. SK Penetapan Hukuman A.n. Ida Asalida, S.Farm., Apt 2. Keputusan Bupati Ttng Penetapan Camat Teladan, 3. Satya Lencana Karya Satya
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)		0,50				0,50	100,00%	
	a.	Informasi faktor jabatan telah disusun		Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya/Tidak	Ya	1		Informasi Faktor Jabatan telah disusun oleh semua Perangkat Daerah
	b.	Peta jabatan telah ditetapkan		a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A/B/C/D	A	1		Peta Jabatan telah ditetapkan oleh semua Perangkat Daerah
	c.	Kelas jabatan telah ditetapkan		a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A/B/C/D	A	1		Kelas Jabatan telah ditetapkan oleh semua Perangkat Daerah
	d.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	B	0,75		Evaluasi Jabatan

	8. Sistem Informasi Kepegawaian (1)	0,50			0,500	0,50	100,00%	
	a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan		Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya/Tidak	Ya	1		Aplikasi SIMPEG
	b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan		a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A/B/C/D	A	1		Aplikasi SIMPEG
	c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM		Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya/Tidak	Ya	1		Aplikasi SIMPEG
	VI. Penguatan Akuntabilitas (6)	6,00				3,00	50,00%	
	1 Keterlibatan pimpinan (2)	1,00				1,00	100,00%	
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1		Dokumentasi Rapat Penyusunan Renstra
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1		Dokumentasi Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1		Dokumentasi Rapat Capaian Kinerja
	2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	2,00				2,00	100,00%	
	a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1		Dokumentasi Coaching Clinic SAKIP
	b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun		Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya/Tidak	Ya	1		Peraturan Bupati ttng Pedoman Penyusunan SAKIP
	c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik		a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	A/B/C/D	A	1		Screenshoot Aplikasi e-SAKIP
	d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit		a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A/B/C/D	A	1		Screenshoot Aplikasi e-SAKIP
	VII. Penguatan Pengawasan (12)	12,00				4,29	35,72%	
	1 Gratifikasi (1,5)	0,75				0,34	45,22%	
	a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1		KEBIJAKAN TENTANG PENANGANAN GRATIFIKASI
	b. Telah dilakukan public campaign		a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A/B/C	B	0,5		Sosialisasi Gratifikasi
	c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0		-
	d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0		-
	e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0		

	f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	75,65%	0,76			Keputusan Bupati Nomor 700/533/Kpts/BPT-PS/2018 Ttng Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara
	a. Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	271				
	- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga			Jumlah	1				
	- Eselon I/II				36,00				
	- Lainnya				234,00				
	b. Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	205				
2	Penerapan SPIP (1,5)	0,75				0,60	80,06%		
	a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP		Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya/Tidak	Ya	1			Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Ttng SPIP
	b. Maturitas SPIP		Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)	Skor (Skala 5)	3,0057	0,60			Laporan Re Assesment Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2017
3	Pengaduan Masyarakat (2)	1,00				1,00	100,00%		
	a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat		Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya/Tidak	Ya	1			KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN
4	Whistle-Blowing System (1,5)	0,75				0,30	40,00%		
	a. Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>		Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya/Tidak	Ya	1			KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
	b. <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	A/B/C/D	A	1			Dokumentasi Sosialisasi Whistle blowing system
	c. <i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan		Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Tidak	0			-
	d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>		a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A/B/C	C	0			-
	e. Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	D	0			-
5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	0,75				0,75	100,00%		
	a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan		Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya/Tidak	Ya	1			Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Ttng Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan
6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)	1,25				0,31	25,00%		
	a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas		Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya/Tidak	Tidak	0			-
	b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas		Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya/Tidak	Tidak	0			-
	c. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan		a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	C	0			-

	d. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"		a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	A/B/C	A	1			Keputusan Bupati Nomor 700/239/Kpts/BPT-PS/2019 Ting Penetapan Perangkat Daerah Menuju WBK dan WBBM
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	1,50				0,98	65,60%		
	a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan		a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A/B/C/D	B	0,67			Rekomendasi APIP
	b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.		a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A/B/C/D	B	0,67			Peta Kompetensi APIP
	c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai		a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A/B/C/D	B	0,67			Anggaran APIP
	d. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko		a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	A/B/C/D	B	0,67			PKPT APIP
	e. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)		Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)	Level (Skala 5)	3	0,60			Berita Acara Penjaminan Kualitas Level 3 Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)		6,00				1,33	22,23%		
1	Standar Pelayanan (1)	0,50				0,50	100,00%		
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perjalanan	Ya/Tidak	Ya	1			Standar Pelayanan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing
2	Budaya Pelayanan Prima (1)	0,50				0,42	83,40%		
	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)		a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A/B/C/D	A	1			Dokumentasi Sosialisasi Pelayanan Prima
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A/B/C	A	1			Sistem Informasi Pelayanan Publik

		c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C	B	0,5			Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik	
		d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A/B/C/D	B	0,67			Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dengan terbentuknya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.	
		e. Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1			Inovasi Pelayanan	
	3	Pengelolaan Pengaduan (1,5)	0,00							
	4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)	0,00							
	5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)	0,50							
		a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1		0,42	83,33%	
		b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A/B/C/D	A	1			Master Plan Pengembangan e-Government	
		c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	B	0,5			Melakukan Reviu terhadap Standar Pelayanan	
TOTAL PENGUNGKIT										27,02
B. SIL (40)										
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)										
	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	14,00	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100	62,59	8,76	62,59%		Laporan Hasil Evaluasi UKJ IP Tahun 2018
	2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6,00	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi	0-5	0,00	0,00	0,00%		
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)										
	1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7,00	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi	0-4	0,00	0,00	0,00%		
	2.	Opini BPK (3)	3,00	Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/WTP-DPP/WDP/TMP/TW/Tidak Ada Laporan	WTP	3,00	100,00%		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)										
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)	10,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4	4,00	10,00	100,00%		Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 dari Ombudsman
TOTAL HASIL										21,76
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI										48,78
										54,41%
										48,78%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Simpulan hasil evaluasi dengan indek 54,06 dengan kategori "CC". Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Komponen Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,18
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,35
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,74
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,13

6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,44
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,31
8.	Peningkatan Kuallitas Pelayanan Publik	6,00	3,12
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	23,65

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Komponen Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,18
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,35
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,74
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,13
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,44
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,31
8.	Peningkatan Kuallitas Pelayanan Publik	6,00	3,12
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	23,65

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Komponen Hasil		
1.	Manajemen Perubahan	14,00	8,76
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	6,00	4,47
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	7,00	5,93

4.	Penataan Tatalaksana	3,00	3,00
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	8,25
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,41
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	54,06

2.2 Rencana Perbaikan Untuk meningkatkan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan merencanakan kegiatan perbaikan berdasarkan rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi, yang dituangkan dalam rencana perbaikan sebagai berikut :

1. Mereviu Road Map RB Kabupaten Pesisir Selatan sehingga selaras dengan Raod RB Nasional 2020-2024.

Dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, pada Peraturan tersebut dinyatakan bahwa Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan difokuskan pada 5 (lima) agenda perubahan yaitu Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM dan Peningkatan Pelayanan Publik menjadi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi di

Kabupaten Pesisir Selatan difokuskan pada 8 (delapan) agenda perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan pelayanan publik

2. Secara Berjenjang melakukan Internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai sehingga mereka memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berupa pengumpulan dokumen semata, namun dititikberakan pada perubahan budaya kinerja sesuai sasaran RB.

Dalam rangka mewujudkan pola pikir dan budaya kerja dan melalui peningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan RB, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan menerapkan budaya kerja diantaranya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/54/Insp-PS/IV/2019 tentang Budaya Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Meningkatkan peran agen perubahan dalam mendorong perubahan pada masing- masing unit kerjanya dengan membuat rencana kerja agen perubahan yang terukur dan dimonitor secara berkala.

Agen perubahan harus membawa perubahan yang yang lbih baik dan menjadi katalis yang positif untuk Perangkat Daerah masing-masing. Hal-hal dasar harus dipahami terlebih dahulu untuk mengawali perubahan dan tidak hanya berhenti di zona nyaman saja. Biasakan selalu berpikir untuk apa saja yang bisa kita kerjakan, sekaligus bisa menata diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru karena kita tidak akan diam ditempat, tetapi harus terus ada perbaikan untuk mencapai nilai terbaik, mengenai agen perubahan diantaranya telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 700/1355/Insp-PS/IV/2020 tentang Agen Perubahan Budaya Pemerintahan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Agen perubahan nantinya akan menjadi katalis/role model yang akan menggerakkan orang lain yang pada akhirnya menjadikan Inspektorat lebih baik. Selain itu agen perubahan akan menjadi corong pimpinan untuk mengkomunikasikan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat. Untuk melakukan perubahan bukanlah hal yang mudah, karena jika ingin mendorong orang lain berubah, bukanlah menunjukkan bagaimana cara untuk merubah, tetapi lebih kepada membangkitkan kesadaran orang untuk melakukan perubahan, tetapi lebih kepada pengembangan kepada kesadaran orang untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain, perubahan jangan dipaksakan, tetapi mencari cara yang “out of the box” yang pada akhirnya akan mewujudkan birokrasi yang lebih baik.

4. Melakukan evaluasi kelembagaan guna mengevaluasi ketepatan fungsi, ukuran serta kesesuaian struktur organisasi dalam mendukung proses pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan evaluasi kelembagaan sehingga nantinya dapat mengetahui apakah Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan sudah efisien atau masih kurang efisien. Evaluasi kelembagaan dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi agar tujuan strategis organisasi dapat tercapai.

5. Melakukan asesmen kepada setiap pegawai dan menetapkan standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Hasil dan proses ini dijadikan dasar untuk rencana pengembangan kompetensi pegawai.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan asesmen melalui kegiatan pemetaan dan talent pool serta

menetapkan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dijadikan dasar untuk rencana pengembangan kompetensi khususnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.

6. Menyusun proses bisnis dan memastikan bahwa proses bisnis tersebut telah mengidentifikasi seluruh proses yang diperlukan dalam mencapai kinerja organisasi. Selain itu pengembangan e-government dapat mengintegrasikan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi.

Keberadaan proses bisnis menjadi sebuah kebutuhan bagi Perangkat Daerah, proses bisnis yang baik akan memberikan dampak positif, seperti efisiensi dari sisi biaya, sumber daya dan waktu, meningkatkan kualitas kerja dan efisiensi kinerja, meningkatkan produktivitas, serta kepuasan pelanggan/masyarakat. Proses bisnis menjadi salah satu tolok ukur kemajuan organisasi dan mempercepat pengambilan keputusan bagi manajemen.

Peta proses bisnis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap eksistensi Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya telah ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/1708/Insp-PS/VI/2020 tentang Penyusunan Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hal yang penting karena memiliki nilai strategis atas eksistensi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dijadikan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran tentang peran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungan kerja dengan instansi lainnya.

Pengembangan e-government menjadi hal penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Penerapan e-government bermanfaat untuk mengurangi biaya, karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang, juga dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan serta meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Master Plan pengembangan e-government dan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui e-government peningkatkan pelayanan publik dapat terwujud.

7. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisai sehingga dapat mengukur kontribusi setiap individu dalam pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya guna mendukung terciptanya budaya kerja disediakan sistem informasi yang menghimpun data tersebut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan cara manual dalam penilaian kinerja pegawai, hal ini tidak efektif dan efisien lagi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan penilaian melalui sistem informasi penilaian kinerja, diharapkan dapat membantu dalam penginputan dan penghitungannya dilakukan secara otomatis serta penyimpanan yang terintegrasi akan membuat sistem informasi penilaian kinerja lebih efektif dan efisien. Sistem informasi tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Sistem informasi ini nantinya juga dapat memotivasi pegawai untuk berkontribusi lebih banyak dalam mencapai tujuan organisai.

8. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniature RB dengan mengacu pada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan Pembangunan Zona Integritas dengan berpedoman kepada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pada tahun 2020 ini yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat persiapan Pembangunan Zona Integritas, melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama membangun Zona Integritas membangun Zona Integritas pada DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai calon unit kerja berpredikat Menuju WBK dan WBBM.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat di setiap unit pelayanan secara berkala.

Inovasi pelayanan publik merupakan solusi untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik agar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yakni mengedepankan norma keadilan, transparan, akuntabel dan terbuka. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei masyarakat dengan melakukan inovasi diantaranya Sicantik untuk pelayanan perizinan. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

10. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi, serta hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi. Selanjutnya diharapkan agar jajaran pimpinan berupaya meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap kinerja yang

akan dicapai serta membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei integritas dengan membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi secara bertahap di lingkungan unit kerja masing-masing. Integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pencapaian seluruh program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan sebagian telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa target yang belum bisa dicapai dengan berbagai kendala yang dihadapinya.

Dari berbagai kendala yang dihadapi, ada sebagian yang harus bergantung pada kebijakan sehingga hanya dapat dilakukan dengan menunggu kebijakan tersebut ditetapkan. Sedangkan kendala yang sifatnya internal, akan terus dilakukan upaya untuk mengatasinya.

Ada pula target yang belum bisa dicapai pada Tahun 2019, target jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan untuk diberikan predikat WBK/WBM karena pencanangan Zona Integritas belum dilakukan.

3.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap area perubahan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil evaluasi internal (PMPRB) maupun saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis kinerja dalam melaksanakan manajemen Pemerintahan.

Melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara intensif terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat ditetapkan menjadi Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Painan, 4 Mei 2020
INSPEKTUR,



AHDA YANUAR, S. Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013